

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PEMBERIAN VAKSIN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Niaty Inya Ida Putri

(1387069)

Kesehatan adalah hal yang utama bagi masyarakat Indonesia. Hal itu berkaitan dengan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Termasuk dalam kegiatan pemberian vaksin kepada balita, yang dimana para balita memiliki hak untuk diberikan imunisasi vaksin yang bermanfaat bagi tubuh balita tersebut, karena dengan diberikannya vaksin kepada tubuh balita Indonesia, balita tersebut dapat memiliki kekebalan tubuh dan tidak mudah untuk terserang penyakit.

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahan sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum, berserta bahan hukum tersier berupa kamus dan *website*. Bahan hukum ini dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi untuk mengetahui pengaturan secara nyata terhadap batasan tanggung jawab dan kedudukan para pihak, serta perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pihak pasien selaku konsumen yang dirugikan oleh vaksin palsu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bahwa perlu adanya aturan yang khusus mengatur tentang vaksin itu sendiri, baik dalam proses pendistribusiannya itu sendiri dan para pihak yang secara jelas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan vaksin .

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Selain itu terdapat pertanggung jawaban hukum dimana para pihak yang terkait harus mampu bertanggung jawab dalam hal kasus vaksin palsu ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : *Kesehatan, perlindungan konsumen, vaksin, tanggung jawab, perlindungan Hukum*

ABSTRACT

GOVERNMENT AND RELATED PARTY'S RESPONSIBILITY REGARDING THE DISTRIBUTION OF CON IN RELATION WITH LAW PROTECTION OF PATIENT'S BASED ON CONSTITUTION REGULATION NUMBER 36, YEAR 2009 ON HEALTH AND CONSTITUTION REGULATION NUMBER 8, YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION

NiatyInya Ida Putri

(1387069)

Health is the main priority for the Indonesian people. Health is related to Indonesian people's prosperity and needs. Including the activity of giving vaccines to the children, where even the children have the right to be given vaccines immunisation that will be beneficial for the children's body, because by Indonesian children taking the vaccines, they will have body immunity and it will not be easy for them to get diseases.

The research method that will be used to analyze is the normative juridical method. Normative juridical method is a method being done by reviewing the secondary data that consists of primary law materials of constitution regulation number 36, year 2009 on health and constitution regulation number 8, year 1999 on consumer protection. Secondary materials are books and law journals, along with the tertiary materials of dictionaries and websites. the law materials is associated with the limitation and the situation of both parties, and the protection by the law for the patients that are being disadvantaged by fake vaccines. The results of this author's research is that a special regulation is required to regulate the vaccination system, both on vaccination distribution progress and the parties that are clearly responsible for vaccination activities.

Law protection is a form of protection for one's dignity, along with the recognition towards human rights owned by the law subjects based on law provision from mistreatment or as a form of rule or subject to protect one from another. In relation to consumer, meaning the law provides protection for consumer rights from the things that cause those rights to be unfulfilled. Besides there are law liabilities where the related parties must be responsible for this fake vaccines case according to the regulations of applicable law.

Key word :*Health, consumer protection, vaccines, responsibility, law protection*

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing.....	iii
Lembar Persetujuan Revisi.....	iv
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	26
H. BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENDISTRIBUSIAN OBAT DAN VAKSIN	
A. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pendistribusian Obat dan Vaksin.....	28
B. Tanggung Jawab Dokter Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien	29
C. Dokter Sebagai Pengemban Profesi Dalam Kesehatan.....	42

1. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi.....	44
2. Tanggung Jawab Hukum.....	45
D. Pemerintah Sebagai Pengatur Kebijakan.....	51

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENDAPATKAN OBAT DAN VAKSIN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

A. Pasien dan Rumah Sakit Dikatakan Sebagai Konsumen dan Pihak Pelaku Usaha.....	57
B. Perlindungan Hukum dan Hak Serta Kewajiban Pasien Selaku Konsumen.....	64
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	64
2. Hak dan Kewajiban Pasien Selaku Konsumen.....	71
3. Perlindungan Hukum Pasien Selaku Konsumen.....	78
C. Pemberian Obat Kepada Pasien Menurut Undang-Undang yang Berlaku.....	92
1. Para Pihak Dalam Pemberian Obat.....	92
2. Peredaran Obat Menurut Undang-Undang yang Berlaku.....	95

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT OBAT DAN VAKSIN PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pihak Terkait Dalam Kasus Vaksin Palsu.....	98
B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang Telah Menjadi Korban Vaksin Palsu Menurut Undang-Undang yang Berlaku.....	118

1. Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang Telah Menjadi Korban Vaksin Palsu Menurut Undang-Undang Kesehatan.....	118
2. Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang Telah Menjadi Korban Vaksin Palsu Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	124
a. Para Pihak yang Bertanggung Jawab Dalam Adanya Korban Vaksin Palsu.....	127
b. Gugatan yang Dapat Diajukan Pasien Selaku Pihak yang Dirugikan.....	134

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	145

